

## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL

Gita Desipradani<sup>1)</sup>, Hadi Sucipto<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Akuntansi; Universitas Muhammadiyah Surabaya

<sup>2)</sup> Akuntansi; STIE PGRI Dewantara Jombang

Email: [gitatesipradani@umsurabaya.ac.id](mailto:gitatesipradani@umsurabaya.ac.id).

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Timur tahun 2016-2020. Data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK). Jenis penelitian kuantitatif menggunakan analisis data regresi berupa data panel yang merupakan gabungan data *time series* tahun 2016 - 2020 dan data *cross-section* 28 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 185 sampel menggunakan *software Eviews 10*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of Fiscal Decentralisation sourced from Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in East Java Regencies and Cities in 2016-2020. The data used comes from the budget realisation report published by the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance (DJPK). This type of quantitative research uses regression data analysis in the form of panel data which is a combination of time series data from 2016 - 2020 and cross-section data of 28 districts and 9 cities in East Java Province as many as 185 samples using Eviews 10 software. The results showed that Regional Original Revenue and Revenue Sharing Fund had no effect on Capital Expenditure while General Allocation Fund and Special Allocation Fund had an effect on Capital Expenditure.*

**Keywords:** Fiscal Decentralisation, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah berarti bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang tidak terkait dengan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah. Sebagai hasil dari otonomi daerah, desentralisasi fiskal mendukung penyerahan tanggung jawab keuangan kepada daerah. Ini memberi daerah kebebasan untuk mengatur keuangan mereka sesuai dengan keinginan, prioritas, dan kebutuhan mereka sendiri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang sama di seluruh Indonesia. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi mereka, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak, dan retribusi, serta potensi lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan PAD dan sumber keuangan daerah untuk menjadikan daerah mandiri dan bertanggung jawab

atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Sementara itu, dengan pengalihan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, ada peningkatan alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri merupakan komponen terbesar dari alokasi transfer ke daerah, sehingga memainkan peran penting dalam mendukung desentralisasi fiskal.

Menurut Halim (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah selain dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah juga akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk menggali potensi daerah dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dana Alokasi Umum mempengaruhi belanja modal karena dialokasikan dengan menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan adanya dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan DAU yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di masing-masing daerah. Dana alokasi umum adalah salah satu dana perimbangan yang mendanai belanja modal yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam anggaran.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dari pendapatan APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus, seperti pendidikan, infrastruktur irigasi, air minum, dan sanitasi, serta kegiatan lain yang diatur oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek untuk meningkatkan kinerja daerah, serta perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana. Belanja modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pengalokasian belanja modal itu sendiri ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui investasi aset tetap pemerintah daerah yaitu berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Pemerintah daerah setiap tahunnya mengalokasikan dana belanja modal untuk mengganti aset lama ataupun pembelian aset baru. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dalail et al. (2020), belanja modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 hingga 2018 dipengaruhi secara positif oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Artinya, penerimaan daerah digunakan untuk membuat layanan publik lebih baik. Selain itu, penelitian Sianturi & Putri (2018) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berdampak positif dan signifikan pada

anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten dari tahun 2012 hingga 2016. Selain itu, penelitian Jikwa et al. (2017) menunjukkan bahwa transfer uang pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berdampak positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten Mambera. Penelitian yang dilakukan oleh Patasik et al. (2021) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020.

Beberapa penelitian menyimpulkan hasil yang berbeda sehingga telah terjadi *gap research*. Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh PAD dan dana transfer berupa DAU, DBH, DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Peacock dan Wiseman**

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan pajak. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya penerimaan pajak tentu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga secara sepadan akan menyebabkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja modal menjadi semakin besar pula.

### **Teori Federalisme Fiskal**

Teori federalisme fiskal adalah teori yang menggambarkan tentang hubungan antara desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah memiliki keleluasan untuk mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi dengan menentukan alokasi anggaran termasuk belanja modal.

### **Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi fiskal berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas

Otonomi. Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (pusat) kepada pemerintahan yang lebih rendah (daerah) dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan (Khusaini, 2006).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sebagai modal utama untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dan mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah. Hal ini sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi potensi yang dimiliki daerah itu sendiri (Fatimah et al., 2020). Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peningkatan pendapatan asli daerah memiliki dampak yang dirasakan masyarakat yaitu dalam menunjang kelancaran pembangunan daerah meliputi pembangunan jalan, fasilitas umum dan lainnya.

### **Dana Bagi Hasil**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 menyatakan bahwa jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

### **Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

### **Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

### **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan pemerintah dengan tujuan penambahan aset tetap dan aset lain. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengadaan tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya adalah pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat juga memiliki manfaat dari pembangunan daerah. Investasi infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain pada akhirnya akan berdampak secara langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

PAD sangat diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah diharapkan menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan didaerahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan dalam hal pembiayaan (Siregar, 2022). Peningkatan PAD juga mendorong naiknya pengalokasian pada belanja modal kabupaten/kota. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Temuan Alvaro (2020) serta Ayomi (2022) memperlihatkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Jikwa et al. (2017) dan Purnasari et al. (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa DBH berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, penerimaan dari DBH secara proporsi dominan digunakan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sektor-sektor unggulan. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Hanida & Ichwanudin (2021) dan Ilhami & Rahayu (2022) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara DAU dan terhadap belanja modal. Artinya, semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU yang selama ini diterima daerah digunakan untuk pembangunan daerah yang terdapat dalam alokasi Belanja Modal. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Penggunaan anggaran DAK ditunjukkan untuk kegiatan investasi jangka panjang, jangka pendek peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang termasuk dalam pengeluaran belanja modal (Juniawan, 2018). Terjadi transfer yang cukup signifikan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini, apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar Dana Alokasi Khusus ke pemerintah daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Halim, 2014:20). Temuan Safitri (2019) serta Malau (2022) memperlihatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif, berupa angka-angka dan peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik penentuan sampel yang dipakai adalah *full sampling* dimana semua populasi digunakan menjadi sampel. Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk data panel yang merupakan gabungan data *time series* tahun 2016 - 2020 dan data *cross-section* 28 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM).

## Variabel dan Definisi Operasional

### Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

### Dana Bagi Hasil (X2)

Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.  
DBH = DBH Pajak + DBH SDA

### Dana Alokasi Umum (X3)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

### Dana Alokasi Khusus (X4)

Dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus. DAK = PU APBD – Belanja Pegawai Daerah

### Belanja Modal (Y)

Belanja langsung yang digunakan untuk mendanai aset tetap. Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Barang, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap lainnya.

### Teknik Analisis Data

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan software *eviews 10*. Berikut Model Regresi Panel nya:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- $BM$  : Belanja Modal
- $i$  : Sampel Kabupaten/Kota
- $t$  : 2011 – 2021
- $\alpha$  : Konstanta / intercept
- $\beta$  : Koefisien regresi
- $\varepsilon_{it}$  : *Standart Error*
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DBH : Dana Bagi Hasil
- DAK : Dana Alokasi Khusus

Dalam analisis Data Panel, perhitungan dilakukan dengan menggunakan tiga model, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Selanjutnya, akan dilakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier

untuk menentukan model apa yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, pengujian yang akan dilakukan uji asumsi klasik antara lain:

- (1) Uji Normalitas. Dasar penarikan kesimpulan uji normalitas ini adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas  $> 0,05$  atau 5%.
- (2) Uji Multikolinieritas. Apabila koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas nilainya  $< 8.0$  maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.
- (3) Uji Heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji Statistik Parametrik yaitu Uji F, Uji T, dan Koefisien  $R^2$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penentuan Model Data Panel

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.035395	(36,144)	0.0000
Cross-section Chi-square	129.048939	36	0.0000

Hasil pengujian model yang disajikan pada Tabel 1 Hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section* F sebesar 0,000 dimana nilai tersebut  $< 0,05$ . Didapatkan kesimpulan bahwa model yang lebih tepat untuk penelitian ini adalah *fixed effect model (FEM)*.

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

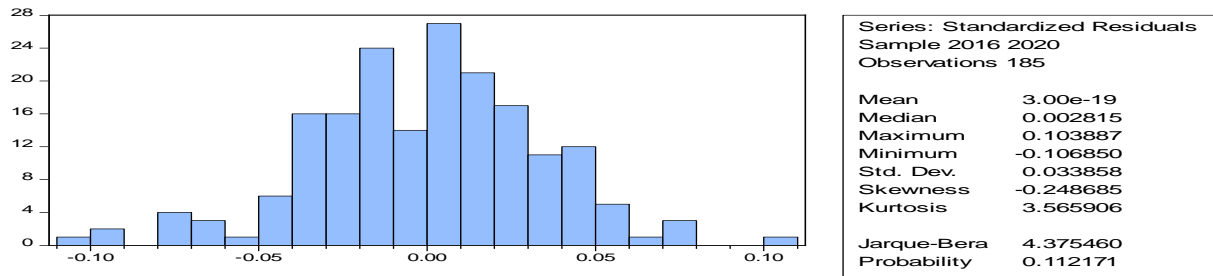
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	36.462239	4	0.0000

Hasil pengujian model yang disajikan pada Tabel 2 Hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas *cross section Random* sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut  $< 0,05$ , maka terpilih *fixed effect model (FEM)*.



### Pengujian Asumsi Klasik

Grafik 1 Uji Normalitas



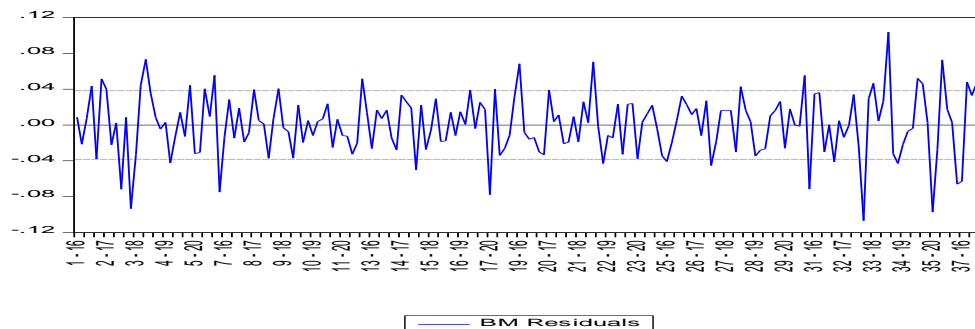
Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas  $0.112171 > 0,05$ . Hasil tersebut memperlihatkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Tabel 4 Uji Multikolinieritas

	PAD	DBH	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.007053	-0.693854	-0.525415
DBH	0.007053	1.000000	-0.433243	-0.418669
DAU	-0.693854	-0.433243	1.000000	0.375496
DAK	-0.525415	-0.418669	0.375496	1.000000

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *correlation* antar variabel tergolong rendah atau kurang dari 0,80. Dihasilkan kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Grafik 2 Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau lolos uji heterokedastisitas.

### Hasil Regresi Data Panel

$$BM = - 0.182742801976 - 0.0272097496649*PAD - 0.0324944097655*DBH + 0.620727745711*DAU + 0.749293488217*DAK + [CX=F]$$

Persamaan regresi tersebut di deskripsikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta - 0.182742801976 menunjukkan apabila variabel independen bernilai 0, maka belanja modal (BM) akan bernilai sebesar - 0.182742801976.

- b. Nilai koefisien variabel PAD memiliki nilai - 0.0272097496649 yang berarti PAD memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal (BM). Hal tersebut mengartikan bahwa apabila PAD mengalami kenaikan 1 persen maka belanja modal (BM) akan turun - 0.0272097496649 dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap.
- c. Nilai koefisien variabel DBH memiliki nilai 0.0324944097655 yang berarti DBH memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal (BM). Hal tersebut mengartikan bahwa apabila DBH mengalami kenaikan 1 persen maka belanja modal (BM) akan naik 0.0324944097655 dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap.
- d. Nilai koefisien variabel DAU memiliki nilai 0.620727745711 yang berarti DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal (BM). Hal tersebut mengartikan bahwa apabila DAU mengalami kenaikan 1 persen maka belanja modal (BM) akan naik 0.620727745711 dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap.
- e. Nilai koefisien variabel DAK memiliki nilai 0.749293488217 yang berarti DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal (BM). Hal tersebut mengartikan bahwa apabila DAK mengalami kenaikan 1 persen maka belanja modal (BM) akan naik 0.749293488217 dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap.

**Tabel 8 Hasil Uji Simultan (F)**

R-squared	0.595455
Adjusted R-squared	0.483082
S.E. of regression	0.038273
Sum squared resid	0.210930
Log likelihood	364.3304
F-statistic	5.298895
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji simultan yang disajikan pada tabel 8 menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 dan nilai tersebut kurang dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memengaruhi Belanja Modal.

**Tabel 9 Hasil Uji Parsial (T)**

Dependent Variable: BM  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/06/24 Time: 07:30  
Sample: 2016 2020  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 37  
Total panel (balanced) observations: 185

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.182743	0.081029	-2.255266	0.0256

PAD	-0.027210	0.188548	-0.144312	0.8855
DBH	-0.032494	0.180952	-0.179575	0.8577
DAU	0.620728	0.114788	5.407584	0.0000
DAK	0.749293	0.195261	3.837397	0.0002

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji T) yang disajikan pada tabel 9 didapatkan kesimpulan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai angka koefisien sebesar - 0.027210 dan nilai probabilitas sebesar 0.8855 dimana nilai tersebut  $> 0,05$  maka, H1 ditolak. Sehingga, secara parsial pendapatan asli daerah tidak memengaruhi belanja modal.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai angka koefisien sebesar - 0.032494 dan nilai probabilitas sebesar 0.8577 dimana nilai tersebut  $> 0,05$  maka, H2 ditolak. Sehingga, secara parsial dana bagi hasil tidak memengaruhi belanja modal.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai angka koefisien sebesar 0.620728 dan nilai probabilitas sebesar 0.000 dimana nilai tersebut  $< 0,05$  maka, H3 diterima. Sehingga, secara parsial dana alokasi umum memengaruhi belanja modal.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai angka koefisien sebesar 0.749293 dan nilai probabilitas sebesar 0.0002 dimana nilai tersebut  $< 0,05$  maka, H4 diterima. Sehingga, secara parsial dana alokasi khusus memengaruhi belanja modal.

**Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

R-squared	0.595455
Adjusted R-squared	0.483082
S.E. of regression	0.038273
Sum squared resid	0.210930
Log likelihood	364.3304
F-statistic	5.298895
Prob(F-statistic)	0.000000

Dilihat dari nilai adjusted R-square pada tabel 10 Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 0.483082 atau 48%, artinya sedangkan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menyatakan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dapat diartikan, kenaikan pendapatan asli daerah belum tentu diikuti kenaikan pengeluaran pemerintah atas belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini sepaham dengan (Mamuka dkk. 2019; Suryani dan Pariani 2018) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dikarenakan realisasi PAD yang masih rendah disebabkan aset pemerintah daerah yang belum dikelola dengan baik sehingga menyebabkan perubahan tingkat signifikansi terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menyatakan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin tinggi penerimaan DBH suatu daerah tentu akan meningkatkan besaran APBD. Secara umum, dana transfer dari pusat diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mendukung sektor-sektor prioritas daerah (DJPb Kemenkeu, 2021). Penerimaan DBH ditetapkan berdasarkan proporsi tertentu atas daerah penghasil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gusti Farhan, Kartika Rachma Sari, dan Muhammad Husni Mubarak 2023; Sulistyawati dan Purwanti 2021) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima suatu daerah maka semakin besar alokasi belanja modalnya. Dapat disimpulkan bahwa DAU dapat membantu meningkatkan pembangunan daerah sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Penting bagi pemerintah daerah mengelola DAU agar tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Adyatma (2015), Dalail et al. (2020) dan Hanida & Ichwanudin (2021) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi DAK maka belanja modal akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih mengandalkan DAK untuk membiayai pelayanan publik melalui belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eka Permadani dkk., 2020) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

## PENUTUP

### Kesimpulan

PAD, DAU, DBH, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Secara parsial PAD dan DBH, tidak berpengaruh terhadap belanja modal, artinya, ketika PAD dan DBH meningkat maka belanja modal belum tentu meningkat. DAU dan DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya, ketika dana transfer dari pusat berupa DAU dan DAK meningkat maka pengeluaran terhadap belanja modal juga akan meningkat.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan tahun penelitian dan sampel Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro, Rendy, Dan Adhi, Prasetyo Pusat, Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Dewan Perwakilan, dan Rakyat Ri. 5 *PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PROVINSI DI INDONESIA The Effect Of Regional General Income and Balancing Fund on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in Provinces of Indonesia.*
- Diaman, Thariq Jihad, Nur Handayani, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, dan Indonesia Surabaya. *PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI.*
- Eka Permadani, Fauziah, Sudati Nur Sarfiah, dan Panji Kusuma Prasetyanto. 2003. *PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA MAGELANG.*
- Gunawan Siregar, Indra. 2022. 6 *Dynamic Management Journal ISSN PENGARUH DAU, DAK, PAD DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL.* <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/dmj>.
- Gusti Farhan, Muhamad, Kartika Rachma Sari, dan Muhammad Husni Mubarak. 2023. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9(6): 2358–70. doi:10.35870/jemsi.v9i6.1620.
- Ichwanudin, Wawan. 2021. 57 *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN.* [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).
- Mamuka, Kartini Katrina, Ita Pingkan, F Rorong, Jacline I Sumual, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, dan Dan Bisnis. 2019. 19 *Jurnal Berkala Ilmiah*

Efisiensi *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sulistyawati, Ardiani Ika, dan Nugrah Septiyani Purwanti. 2021. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur)." *ANALISIS* 11(1): 48–67. doi:10.37478/als.v11i1.829.

Suryani, Febdwi, dan Eka Pariani. 2018. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR* 6(1). <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/det>.